

Deeper Dive

Rekomendasi Kebijakan untuk Memajukan Ekosistem Kebudayaan Jakarta

Martin Suryajaya



Tentang Penulis



Martin Suryajaya adalah pengajar pada Sekolah Pascasarjana, Institut Kesenian Jakarta. Ia berpengalaman sebagai konsultan kebijakan budaya dan banyak menulis buku mengenai seni dan budaya. Beberapa karya tulisnya yang sudah diterbitkan antara lain adalah *Sejarah Estetika*, *Principia Logica*, dan *Meta-Eстетika*.



Rekomendasi Kebijakan untuk Memajukan Ekosistem Kebudayaan Jakarta

Martin Suryajaya

Jakarta memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai kota yang kaya akan keragaman budaya, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam mengelola potensi ini untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut data terbaru, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jakarta masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi budaya

terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dari ekosistem kebudayaan Jakarta, mulai dari kerangka pemikiran tentang metabolisme pembangunan, kelemahan Jakarta dalam IPK, hingga rekomendasi kebijakan yang mencakup pendanaan berkelanjutan, pengelolaan ruang publik, dan pemberdayaan institusi kebudayaan.

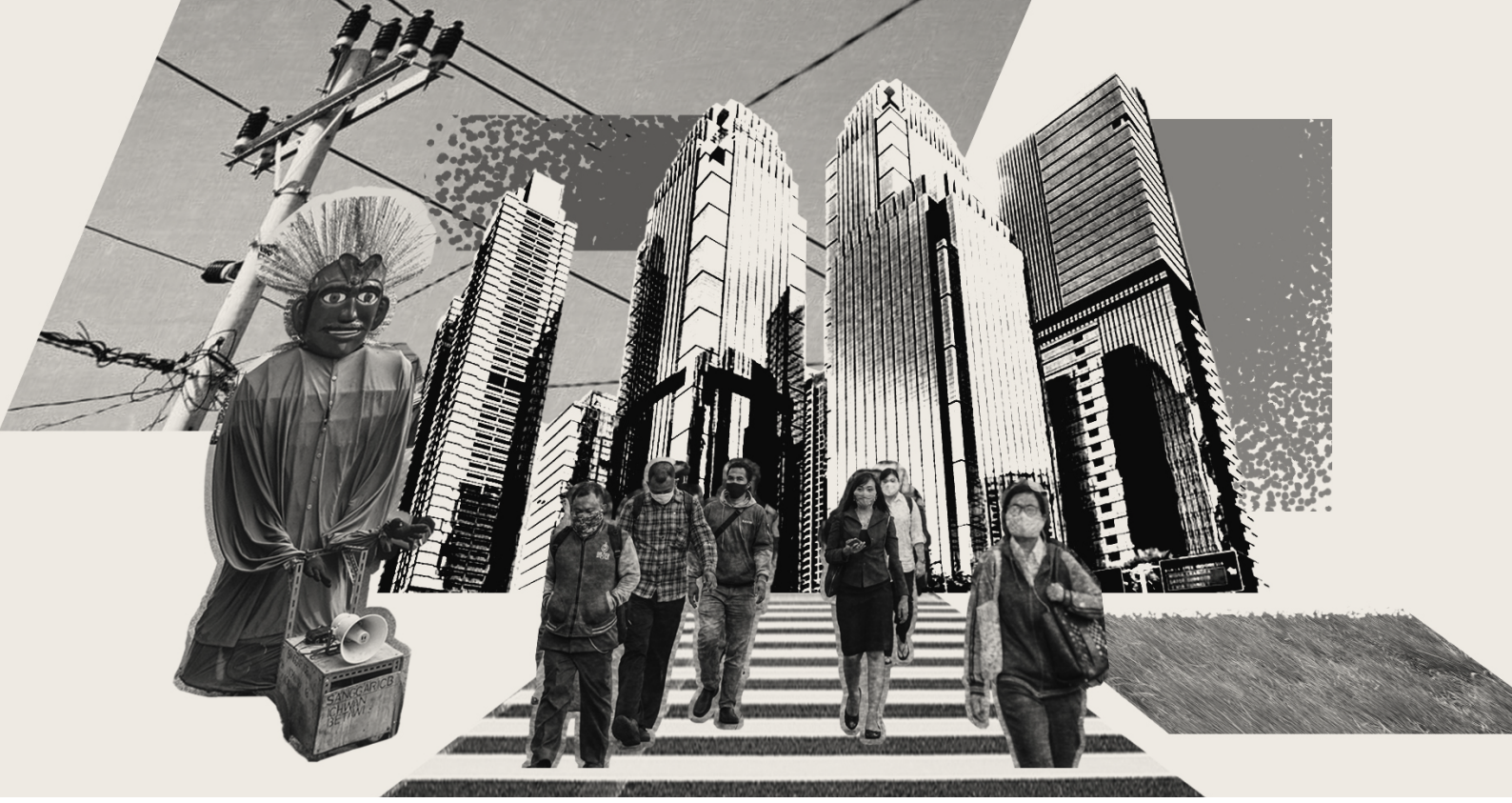
Metabolisme Pembangunan

Metabolisme sosial adalah konsep yang mengacu pada cara masyarakat manusia mengelola aliran energi, material, dan informasi dari lingkungannya untuk mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan, konsep ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara eksploitasi sumber daya alam dan budaya dengan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pembangunan yang tidak memperhitungkan metabolisme sosial sering kali menghasilkan ketimpangan, degradasi lingkungan, dan hilangnya nilai-nilai budaya.

Ada dua domain utama dalam metabolisme pembangunan. Pertama, domain reproduksi (*care sector*) yang berfungsi untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya. Domain ini mencakup aspek-aspek yang sering kali tidak dihitung sebagai elemen ekonomi, seperti adat istiadat, seni tradisional, dan ruang-ruang interaksi sosial. Dalam konteks ini, domain reproduksi cenderung dianggap sebagai "*externalities*", yaitu aspek yang diterima begitu saja tanpa perhitungan kontribusinya

dalam neraca pembangunan. Kedua, domain produksi (*extractive sector*) yang berfokus pada pengambilan keuntungan dari sumber daya, termasuk sumber daya budaya. Eksploitasi yang tidak diimbangi dengan reinvestasi pada domain reproduksi dapat menyebabkan degradasi kehidupan sosial dan budaya, yang pada akhirnya juga berdampak negatif pada domain produksi itu sendiri.

Konsep metabolisme sosial menekankan bahwa kedua domain ini tidak dapat dipisahkan. Domain reproduksi menyediakan basis keberlanjutan bagi domain produksi. Sebaliknya, eksploitasi domain produksi tanpa reinvestasi pada domain reproduksi akan melemahkan kapasitas masyarakat untuk bertahan. Fokus pembangunan yang terlalu berat pada domain produksi menyebabkan ketimpangan dalam alokasi sumber daya. Domain reproduksi seperti seni tradisional atau pendidikan seni sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Biaya sosial, lingkungan, dan budaya yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi sering kali tidak



diperhitungkan dalam neraca pembangunan. Hal ini menyebabkan kerugian yang tidak terlihat dalam jangka pendek tetapi berdampak signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, hilangnya investasi dalam domain reproduksi memperlemah jaringan sosial, solidaritas, dan identitas budaya masyarakat. Akibatnya, pembangunan menjadi rentan terhadap konflik sosial dan resistensi masyarakat.

Jakarta menghadapi tantangan metabolisme sosial yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menyebabkan eksploitasi sumber daya budaya tanpa investasi yang memadai pada domain reproduksi. Misalnya, seni tradisional dan adat istiadat sering kali terpinggirkan dalam kebijakan kota yang berfokus pada komodifikasi budaya untuk pariwisata. Hal ini tercermin dalam rendahnya IPK Jakarta dibanding rata-rata nilai IPK nasional.



Source: Wikimedia Commons

Kelemahan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jakarta

Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memajukan sektor budaya nasional. Namun, berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam dua tahun terakhir (2022-2023), kinerja budaya Jakarta justru berada di bawah rata-rata nasional:

2022



2023



Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan budaya di kota ini, terutama pada tiga dimensi utama: ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya.



Dimensi Ekonomi Budaya

Dimensi ekonomi budaya mengukur kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian, baik melalui peluang kerja maupun konsumsi produk budaya. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk Jakarta yang terlibat sebagai pelaku seni untuk mendapatkan penghasilan relatif rendah. Hal ini mencerminkan kurangnya dukungan terhadap industri seni sebagai sektor ekonomi yang potensial. Padahal, dengan jumlah penduduk yang besar dan daya beli yang tinggi, Jakarta memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar seni dan budaya. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk produk-produk budaya di Jakarta masih kecil dibandingkan total pengeluaran bukan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa produk budaya belum menjadi bagian penting dari pola konsumsi masyarakat, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya promosi, harga yang tidak terjangkau, atau keterbatasan akses terhadap produk budaya lokal.



Dimensi Warisan Budaya

Dimensi warisan budaya mencerminkan upaya dalam melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya lokal, termasuk cagar budaya, Warisan Budaya Takbenda (WB Tb), dan bahasa daerah. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan secara resmi masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan validasi warisan budaya berjalan lambat, baik karena keterbatasan sumber daya manusia maupun kendala administratif. Persentase penduduk yang menonton pertunjukan seni atau mengunjungi tempat bersejarah di Jakarta juga relatif rendah. Ini menunjukkan rendahnya minat masyarakat terhadap warisan budaya yang dapat disebabkan oleh kurangnya promosi atau aksesibilitas yang terbatas ke tempat-tempat tersebut.



Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi ekspresi budaya menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan budaya, seperti upacara adat, pertunjukan seni, olahraga tradisional, dan penggunaan produk budaya tradisional. Rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni di Jakarta menjadi tanda bahwa seni pertunjukan belum menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari warga. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya ruang atau fasilitas untuk pertunjukan seni yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, persentase rumah tangga yang membeli atau menggunakan produk budaya tradisional, seperti pakaian adat atau kerajinan tangan, juga rendah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih produk modern yang dianggap lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup perkotaan.



Ketiga dimensi ini menunjukkan adanya beberapa tantangan besar dalam memajukan IPK Jakarta: (1) kurangnya investasi dalam infrastruktur budaya: ruang publik budaya, museum, dan fasilitas seni yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya; (2) minimnya dukungan kebijakan yang inklusif: kebijakan yang ada sering kali lebih berfokus pada domain ekonomi produksi daripada domain reproduksi, seperti pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekspresi budaya; (3) kurangnya edukasi budaya: pendidikan seni dan budaya belum menjadi prioritas dalam sistem pendidikan formal, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memajukan Ekosistem Kebudayaan Jakarta

Memajukan ekosistem kebudayaan Jakarta memerlukan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan kelemahan dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terdapat tiga rekomendasi utama yang dapat diajukan, yaitu pembentukan Dana Abadi Kebudayaan, pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai ruang publik budaya, dan penguatan peran Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) serta Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem budaya yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.

1. Dana Abadi Kebudayaan Jakarta

Sektor budaya di Jakarta membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai inisiatif dan program yang dapat memperkuat ekosistem kebudayaan. Pendanaan yang stabil akan memastikan kelangsungan kegiatan budaya, termasuk pelestarian warisan budaya, pengembangan seni pertunjukan, serta pemberdayaan komunitas budaya. Dalam konteks ini, pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Jakarta menjadi salah satu solusi strategis.

Dana abadi adalah mekanisme pendanaan yang dirancang untuk memberikan

dukungan keuangan secara berkelanjutan melalui investasi awal yang menghasilkan pendapatan tetap. Inspirasi untuk pembentukan dana ini dapat diambil dari Dana Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Model ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sektor kebudayaan memiliki akses ke sumber daya yang konsisten setiap tahunnya, tanpa harus bergantung pada fluktuasi anggaran pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan, pemerintah seharusnya memainkan peran sebagai fasilitator, bukan eksekutor. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan komunitas budaya diharapkan menjadi aktor utama dalam menjalankan inisiatif budaya, sementara pemerintah hanya menyediakan dukungan berupa pendanaan dan regulasi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas masyarakat untuk berkembang.

Untuk memastikan efektivitas dana abadi, mekanisme seleksi penerima hibah harus dilakukan oleh profesional independen di sektor budaya. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bertugas melaku-

kan seleksi administratif, sementara penilaian substansi dilakukan oleh panel yang terdiri dari para ahli budaya, seniman, dan akademisi. Dengan cara ini, dana abadi dapat digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

2. Pengelolaan Taman Ismail Marzuki sebagai Ruang Publik Budaya

Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah salah satu pusat kebudayaan paling penting di Jakarta. Sebagai ruang publik budaya, TIM harus dikelola dengan prinsip bahwa ia adalah milik bersama masyarakat Jakarta, bukan sebagai aset komersial semata. Oleh karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan aksesibilitas, inklusivitas, dan peningkatan mutu layanan, bukan sekadar mencari keuntungan finansial.

Salah satu rekomendasi utama adalah mengelola TIM di bawah format Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perbedaan utama antara keduanya adalah fokus orientasi. BLUD memungkinkan penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yang dapat direinvestasikan untuk meningkatkan kualitas layanan budaya di TIM. Sebaliknya, BUMD cenderung berorientasi pada laba, yang dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan budaya.

Melalui model BLUD, TIM dapat menjalankan fungsi sebagai ruang eksperimentasi

budaya yang inklusif. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan seni dan budaya—seperti pameran, pertunjukan, dan festival—dapat digunakan kembali untuk mendanai program-program lain, seperti pelatihan seni untuk komunitas marginal atau konservasi karya seni.

3. Penguatan Peran Dewan Kesenian Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) adalah institusi penting dalam pengembangan seni dan budaya di Jakarta. Untuk meningkatkan efektivitas DKJ, diperlukan mekanisme pendanaan yang andal dan proporsional. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengalokasikan anggaran tetap, misalnya 0,5% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 5% dari anggaran urusan wajib non-pelayanan dasar. Dengan pendanaan ini, DKJ dapat merancang program jangka panjang yang berdampak besar, seperti festival budaya tahunan, lokakarya seni, dan pameran internasional. Selain itu, DKJ juga perlu diberdayakan sebagai mitra strategis dalam pembuat kebijakan seni dan budaya di Jakarta. Pemerintah dapat melibatkan DKJ dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan sektor budaya.

Institut Kesenian Jakarta (IKJ) memiliki

peran penting sebagai institusi pendidikan yang mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang seni. Sejak masa kepemimpinan Ali Sadikin, IKJ dirancang untuk meningkatkan mutu SDM seni di Jakarta. Namun, untuk mendukung peran ini, IKJ memerlukan dukungan yang lebih besar, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif. Peningkatan kualitas IKJ akan berdampak langsung pada peningkatan dimensi ekonomi budaya dalam IPK Jakarta. Lulusan seni yang kompeten dan terampil dapat mengisi berbagai sektor industri kreatif, seperti seni pertunjukan, seni rupa, film, dan animasi.

**DKJ, IKJ, dan TIM
perlu dilihat
sebagai satu
ekosistem budaya
yang saling
melengkapi.**

DKJ berfungsi mengelola komunitas seniman, IKJ mencetak seniman berbakat, dan TIM menyediakan ruang untuk eksperimentasi seni. Sinergi antara ketiganya dapat menciptakan siklus budaya yang berkelanjutan, di mana inovasi seni dan budaya terus berkembang dan didukung oleh ekosistem yang solid.

Ketiga rekomendasi kebijakan di atas memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memajukan ekosistem kebudayaan Jakarta. Pembentukan Dana Abadi Kebudayaan Jakarta akan memberikan pendanaan yang berkelanjutan, sementara pengelolaan TIM sebagai ruang publik budaya yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Selain itu, penguatan peran DKJ dan IKJ akan memastikan bahwa sektor budaya memiliki fondasi institusi yang kokoh. Dengan implementasi kebijakan ini, Jakarta tidak hanya dapat memperbaiki performa IPK-nya tetapi juga menjadi model kota budaya yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Langkah ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, memperkuat identitas budaya kota, dan meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global. (MS/AM)

